

RENCANA KERJA 2020



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. LUWU TIMUR**

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

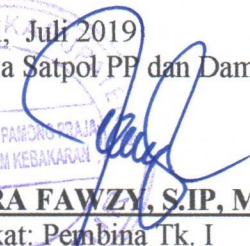
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada tahun berkenan. Program dan kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Renja SKPD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunannya telah berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJP, RPMJD, Renstra SKPD dan RKPD.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen Renja ini agar dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan sumbangsihnya sehingga Rencana Kerja ini dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, Juli 2019
Kepala Satpol PP dan Damkar

INDRA FAWZY, S.I.P, M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19701103 199003 1 002

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.....	12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	14
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.....	14
3.2. Program dan Kegiatan	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan setiap PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar, sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun.
3. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

**BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan serta sejauhmana realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD.

Dalam rangka pencapaian sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2018 melaksanakan 12 program dan 44 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
	22	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD
	23	Monitoring dan evaluasi
	24	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	34	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
	51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
03		Program peningkatan disiplin aparatur
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	05	Penguatan Kapasitas Polisi Pamong Praja
	06	Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
06		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	05	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
08		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
	10	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	11	Penyiapan Tenaga Pengamanan dan Pengawalan
16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
	08	Sosialisasi Peraturan Barang Kena Cukai
19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	04	Penyiapan Tenaga Pengamanan Asset dan Pejabat Pemerintah Daerah
	05	Koordinasi dan pelaporan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satlinmas
	06	Penyelenggaraan Apel Besar Satpol PP dan Satlinmas
22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	05	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana
23		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	01	Pembinaan dan pengawasan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	02	Operasi Yustisi penegakan Perda dan Perkada
	03	Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	04	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
24		Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
	01	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran
	03	Penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran
	05	Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR
	06	Pelatihan petugas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana
	07	Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (SATLAKAR)

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam Tabel. 2.1 (terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Luwu Timur, Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
- Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam pada Tabel 2.2. (terlampir)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar adalah keterbatasan kompetensi pegawai yang ada (PNS dan Upah Jasa), terbatasnya sarana prasarana terutama sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dan ketaatan terhadap peraturan daerah.

Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang baik antar stakeholder penegakan peraturan daerah yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Luwu Timur yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non-yustisial dan pro-yustisi serta

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Berkaca pada permasalahan yang ada, direkomendasikan bahwa:

- 1) Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, penyelenggaraan ketertiban, dan penegakan peraturan daerah maka akan diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menangani gangguan Ketertiban, ketenteraman dan keindahan, menyelesaikan pelanggaran perda, serta tanggap bencana dan bahaya kebakaran.
- 3) Dalam mewujudkan kemandirian dan kenyamanan lingkungan diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak diantaranya Polri/TNI, OPD Pengampu Peraturan Daerah, para aparat di tingkat kecamatan desa/kelurahan hingga RT dan Dusun.
- 4) Penambahan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Satpol PP dan Damkar. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3. (terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

diusulkan oleh masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP dan Damkar menetapkan tujuan:

- 1) Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Sasaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Meningkatkan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

3.2. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk pembiayaan telepon, air, listrik dan internet.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dimaksud mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja sebagai sarana kerja dan pelayanan kepada masyarakat harus dalam kondisi siap pakai.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Kegiatan ini dimaksud ketersediaan peralatan dan perlengkapan listrik di kantor dan pos penjagaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kerja dalam 1 tahun.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dimaksud untuk ketersediaan bahan bacaan surat kabar di kantor.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tenaga teknis
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan upah jasa yang sangat dibutuhkan mengingatnya minimnya jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.
- Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD
Kegiatan ini dimaksud mendukung kelancaran kegiatan perkantoran selama 1 tahun
- Monitoring dan evaluasi
Kegiatan ini dimaksud untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Satpol PP.
- Kunjungan kerja dalam daerah
Kegiatan ini dimaksud untuk melakukan kunjungan kerja dalam wilayah Kab. Luwu Timur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan sarana angkutan berupa kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional.
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Untuk penyediaan sarana gedung kantor Satpol PP Kab. Luwu Timur, maka dilaksanakan pembangunan gedung kantor

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja di kantor yang nyaman selama 1 tahun.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini guna mendukung kelancaran kegiatan di luar kantor, maka kondisi kendaraan dinas / operasional harus selalu dalam kondisi layak
 - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan ini untuk penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kepada aparat Satpol PP dan Damkar
 - Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini untuk penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu kepada aparat Satpol PP dan Damkar
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Untuk terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparat.
 - Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM personil Satpol PP
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - Penyusunan laporan keuangan semesteran

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Dimaksudkan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dimaksudkan untuk kegiatan operasi K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan).

- Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Melakukan kegiatan patroli wilayah guna pencegahan potensi pelanggaran perda dan/atau pendeteksian pelanggaran perda.

- Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan

Kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dan pengawalan pejabat dan/atau tamu daerah

- Penyiapan tenaga pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah

Merupakan kegiatan dalam rangka pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah.

8. Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan peningkatan kapasitas satlinmas.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program satlinmas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

- Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas

Merupakan kegiatan pelaksanaan apel besar Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka memperingati hari jadi Satpol PP dan Satlinmas.

- Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Merupakan kegiatan dalam rangka membina dan memberdayakan unit satlinmas di desa

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas personil satlinmas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas-tugas linmas

9. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana

Merupakan kegiatan dalam rangka ketersediaan tenaga penanggulangan bencana dan deteksi dini

10. Program penegakan perda dan perkara yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Kawasan tanpa Rokok

Merupakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok. Kegiatan ini dapat berbentuk sosialisasi ataupun pembinaan dan penindakan terhadap pelanggar perda kawasan tanpa rokok

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

Merupakan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan daerah dan kepala daerah dengan stakeholder lainnya yaitu pengadilan, kejaksaan dan Polri

- Penindakan Non-Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan penindakan secara non-yustisial, seperti melakukan peneguran dan peringatan terhadap pelanggar perda

- Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan penindakan secara yustisial, baik itu dalam bentuk operasi yustisi maupun penyelesaian

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

kasus pelanggaran perda secara yustisial dengan melaksanakan sidang tindak pidana ringan

- Kerjasama Pengawasan Barang kena Cukai Illegal
Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan pengawasan barang kena cukai khususnya rokok dengan bekerjasama dengan pihak terkait.
- Pembinaan Kesekretariatan penyidik pegawai negeri sipil
Kegiatan ini dimaksud mendukung kelancaran operasional sekretariat PPNS
- Fasilitasi pengelolaan informasi dan pengaduan pelaksanaan perda/perkada
Kegiatan ini dimaksud menyediakan layanan pengaduan dan laporan masyarakat dalam bentuk aplikasi atau website

11. Program pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kesiapsiagaan satgas pemadam kebakaran
Merupakan kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan pemadam kebakaran
- Penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran
- Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dengan mengadakan mobil pemadam kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dengan mengadakan sarana dan prasarana pendukung seperti alat-alat dan perlengkapan pemadam kebakaran
- Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Berbasis Masyarakat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan melibatkan masyarakat menjadi relawan (Satlakar)

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

- Pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pemadam kebakaran terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (n)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
0	Non Urusan		
0 0	-		
0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7,300,813,400
0 0 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat	1,300,000
0 0 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 rekening	75,566,400
0 0 1 6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17 Jenis	17,000,000
0 0 1 7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	83 unit	25,000,000
0 0 1 8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 jenis	19,622,000
0 0 1 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	15,000,000

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (n)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)
0	0	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	5,200,000
0	0	1	12	Penyediaan makan dan minum	800 Kotak	10,000,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan undang-undang	5 jenis	10,000,000
0	0	1	16	Penyediaan bahan logistik	2 Jenis	2,000,000
0	0	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	429,854,000
0	0	1	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	367 orang	6,606,000,000
0	0	1	21	Monitoring dan Evaluasi	22 dokumen	10,000,000
0	0	1	22	Kunjungan kerja dalam daerah	60 kali	74,271,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	537,500,000
0	0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	45,000,000
0	0	2	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	150,000,000
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	35,000,000
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41 unit	300,000,000
0	0	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan	5 unit	7,500,000
0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	165,600,000
0	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	85,000,000
0	0	3	5	Penggandaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	80,600,000

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (n)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)
0	0	3	12	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	0	0
0	0	6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%	15,000,000
0	0	6	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 dokumen	15,000,000
0	0	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	323,000,000
0	0	4	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	23,000,000
0	0	4	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 kegiatan	175,000,000
0	0	4	4	Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja	5 kegiatan	125,000,000
0	0	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	13,000,000
0	0	5	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 dokumen	3,000,000
0	0	5	6	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	10,000,000
1				Wajib		
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	2,355,200,000
1	5	16	10	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	27%	450,000,000
1	5	16	11	Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah	100%	1,495,200,000

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (n)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)
1	5	16	12	Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	71%	70,000,000
1	5	16	13	Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan	100%	340,000,000
1	5	44		Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	22,88 %	3,108,618,400
1	5	44	1	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	96%	1,116,890,000
1	5	44	3	Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	200 orang	15,000,000
1	5	44	8	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	2 unit	1,600,000,000
1	5	44	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran	60 unit	200,000,000
1	5	44	12	Pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	90 orang	176,728,400
1	5	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	80,000,000
1	5	22	5	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	100%	30,000,000
1	5	22	6	Penyusunan kajian teknis/roadmap pengembangan satlinmas	1 dokumen	50,000,000
1	5	38		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85%	646,990,000
1	5	38	4	Pengawasan kawasan tanpa rokok	57%	44,852,000
1	5	38	5	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah/peraturan	4 kali	20,017,000

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (n)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)
				kepala daerah		
1	5	38	7	Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah	50%	80,966,000
1	5	38	8	Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah	36%	261,408,000
1	5	38	9	Kerjasama pengawasan barang kena cukai illegal	22 kali	65,507,000
1	5	38	10	Pembinaan kesekretariatan PPNS	100%	134,240,000
1	5	38	11	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	2 regulasi	25,000,000
1	5	38	12	Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan Perda/Perkada	100%	15,000,000
1	5	49		Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	100%	382,430,000
1	5	49	1	Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas	1 kegiatan	100,000,000
1	5	49	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	2 dokumen	32,430,000
1	5	49	3	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas	62 unit	100,000,000
1	5	49	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas	228 orang	150,000,000
						14,928,151,800

BAB V
PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi tahun keempat dari Renstra SKPD Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2020 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satpol PP dan Damkar.

Renja Satpol PP dan Damkar merupakan dokumen operasional yang memuat sejumlah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2020 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. RKA yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP dan Damkar sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi

RENCANA KERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2020, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program.
3. Pada Akhir Tahun anggaran 2018, Satpol dan Damkar wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

Akhir kata semoga Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, 5 Juli 2019

Kepala Satpol PP dan Damkar


INDRA FAWZY, S.I.P, M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19701103 199003 1 002

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	0								
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	7,131,580,800		0	
0.1.05.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan	2.500 surat	1,000,000	Pendapatan Daerah		2.500 surat	1,200,000
0.1.05.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik terbayarkan	11 rekening	74,000,000	Pendapatan Daerah		12 rekening	77,000,000
0.1.05.01.001.006	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 orang	17,000,000	Pendapatan Daerah		1 orang	20,000,000
0.1.05.01.001.007	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	83 unit	20,000,000	Pendapatan Daerah		100 unit	30,000,000
0.1.05.01.001.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	jumlah ATK yang disediakan	30 jenis	10,000,000	Pendapatan Daerah		30 jenis	25,000,000
0.1.05.01.001.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	5,000,000	Pendapatan Daerah		10 jenis	10,000,000
0.1.05.01.001.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis	5,000,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	5,000,000
0.1.05.01.001.012	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	800 kotak	7,500,000	Pendapatan Daerah		0 kotak	10,000,000

0.1.05.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 jenis	6.180,000	Pendapatan Daerah		5 jenis	10,000,000
0.1.05.01.001.016	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang disediakan	2 jenis	1,000,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	1,500,000
0.1.05.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	40 kali	300,900,800	Pendapatan Daerah		0 kali	429,854,000
0.1.05.01.001.019	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbarkan	367 orang	6.606,000,000	Pendapatan Daerah		367 orang	6.606,000,000
0.1.05.01.001.021	Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	8 dokumen	8,000,000	Pendapatan Daerah		0 dokumen	10,000,000
0.1.05.01.001.022	Kunjungan kerja dalam daerah	Kabupaten	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	60 kali	70,000,000	Pendapatan Daerah		0 kali	75,000,000
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	308,000,000		0	
0.1.05.01.002.003	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten	Jumlah gedung kantor (UPTD/pos damkar) yang dibangun	0 unit	0	Pendapatan Daerah		1 unit	750,000,000
0.1.05.01.002.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 unit	0	Pendapatan Daerah		10 unit	550,000,000
0.1.05.01.002.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis	65,500,000	Pendapatan Daerah		10 jenis	200,000,000
0.1.05.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	10,000,000	Pendapatan Daerah		3 unit	45,000,000
0.1.05.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41 unit	225,000,000	Pendapatan Daerah		50 unit	350,000,000

0.1.05.01.002.030	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan	SKPD	Jumlah alat-alat persenjataan/keamanan yang dipelihara	5 unit	7,500,000	-		0 unit	0
0.1.05.01.002.045	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (unit)	0 unit	0	Pendapatan Daerah		6 unit	240,000,000
			Jasa perencanaan pembuatan/pemba- ngunan hidran	0 dokumen				0 dokumen	
0	0	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparaturnya	100%	80,600,000	0	
0.1.05.01.003.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0 paket	0	Pendapatan Daerah		2 paket	150,000,000
0.1.05.01.003.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	1 paket	80,600,000	-		0 paket	0
0.1.05.01.003.012	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kabupaten	jumlah pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	0 kali	0	-		0 kali	0
0	0	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	13,000,000	0	
0.1.05.01.005.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 dokumen	3,000,000	-		0 dokumen	0
0.1.05.01.005.006	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	jumlah dokumen laporan akuntabilitas instansi pemerintah	1 dokumen	10,000,000	-		0 dokumen	0
0	0	6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	100%	10,000,000	0	

0.1.05.01.006.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	6 dokumen	10,000,000	Pendapatan Daerah		6 dokumen	15,000,000
0	0	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	226,000,000		0	
0.1.05.01.004.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	jumlah sosialisasi produk hukum daerah	1 kegiatan	0	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	23,000,000
0.1.05.01.004.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bimtek/pelatihan pengembangan aparatur	5 kegiatan	136,000,000	Pendapatan Daerah		5 kegiatan	270,000,000
0.1.05.01.004.004	Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja	Kabupaten	jumlah pelatihan kepomong prajaan	5 kegiatan	90,000,000	Pendapatan Daerah		5 kegiatan	150,000,000
1			Wajib						
1	5		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	5	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	2,000,200,000		0	
5.1.05.01.016.010	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Kabupaten	Persentase Patroli Wilayah yang ditindaklanjuti	27%	400,000,000	Pendapatan Daerah		50%	500,000,000
5.1.05.01.016.011	Penyiapan Tenaga Pengamanan aset dan pejabat pemerintah daerah	Kabupaten	Persentase pengamanan terhadap aset dan pejabat pemerintah daerah	100%	1,270,200,000	-		0%	1,797,000,000
5.1.05.01.016.012	Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kabupaten	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	71%	50,000,000	Pendapatan Daerah		71%	100,000,000
5.1.05.01.016.013	Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan	Kabupaten	Persentase pengamanan dan pengawalan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat negara dan tamu daerah yang dilakukan	100%	280,000,000	Pendapatan Daerah		100%	280,000,000
1	5	38	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	cakupan penegakan perda dan perkara	87%	239,271,000		0	

5.1.05.01.038.004	Pengawasan kawasan tanpa rokok	Kabupaten	Persentase pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok	57%	15,000,000	Pendapatan Daerah		90%	75,000,000
5.1.05.01.038.005	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah	Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya	4 kali	0	Pendapatan Daerah		3 kali	30,000,000
5.1.05.01.038.007	Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah	Kabupaten	persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan Non yustisi	50%	70,000,000	Pendapatan Daerah		75%	150,000,000
5.1.05.01.038.008	Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah	Kabupaten	persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan yustisi	36%	75,000,000	Pendapatan Daerah		36%	250,000,000
5.1.05.01.038.009	Kerjasama pengawasan barang kena cukai ilegal	Kabupaten	frekwensi pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal (rokok)	11 kali	15,000,000	Pendapatan Daerah		33 kali	75,000,000
5.1.05.01.038.010	Pembinaan kesekretariatan PPNS	Kabupaten	Persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi sekretariat PPNS	100%	50,000,000	Pendapatan Daerah		100%	100,000,000
5.1.05.01.038.011	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi	14,271,000	Pendapatan Daerah		5 regulasi	50,000,000
5.1.05.01.038.012	Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan Perda/Perkada	Kabupaten	persentase penyediaan layanan pengaduan dan laporan masyarakat	0%	0	Pendapatan Daerah		100%	150,000,000
1	5	44	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran					0	
5.1.05.01.044.001	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Kabupaten	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah Manajemen Kebakaran	96%	1,050,000,000	Pendapatan Daerah		96%	1,300,000,000

5.1.05.01.044.003	Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran	200 orang	22,500,000	Pendapatan Daerah		500 orang	50,000,000
5.1.05.01.044.008	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Kabupaten	Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang diadakan (KPI)	2 unit	1,717,000,000			0 unit	3,200,000,000
5.1.05.01.044.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan	0 unit	0	Pendapatan Daerah		60 unit	250,000,000
5.1.05.01.044.010	Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Berbasis Masyarakat	Kabupaten	Jumlah Satalakar yang mengikuti pelatihan	0 orang	0	Pendapatan Daerah		127 orang	150,000,000
5.1.05.01.044.012	Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Kabupaten	Jumlah aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya	0 orang	0	Pendapatan Daerah		150 orang	250,000,000
1	5	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		15,000,000				
5.1.05.01.022.005	Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	100%	15,000,000	Pendapatan Daerah		100%	30,000,000
			jumlah keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana dan deteksi dini	0 kali				0 kali	
5.1.05.01.022.006	Penyusunan kajian teknis/roadmap pengembangan Satlinmas	Kabupaten	jumlah dokumen road map pengembangan Satlinmas	0 dokumen	0	Pendapatan Daerah		1 dokumen	50,000,000
1	5	49	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat		115,000,000			0	
			Persentase peningkatan kapasitas satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	100%					

5.1.05.01.049.001	Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas	Kabupaten	terlaksananya apel besar Satpol PP dan Satlinmas	0 kegiatan	0	Pendapatan Daerah		1 kegiatan	100,000,000
5.1.05.01.049.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Kabupaten	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas satlinmas	2 dokumen	15,000,000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	50,000,000
5.1.05.01.049.003	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas	Kabupaten	Jumlah unit satlinmas yang dibina dan diberdayakan	62 unit	50,000,000	Pendapatan Daerah		127 unit	100,000,000
5.1.05.01.049.004	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas	Kabupaten	Jumlah aparaturnya Satlinmas yang terlatih	100 orang	50,000,000	Pendapatan Daerah		200 orang	10,000,000
			TOTAL		12,928,151.800				19,150,554,000